



**Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

LAPORAN KINERJA (Lkj) TA. 2018



TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

Laporan ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Perubahan Tahun 2018 yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 memuat Capaian Kinerja Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPRD kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kritik dan saran dari semua pihak kami harapkan guna penyempurnaan dalam penyusunan dimasa mendatang.

Kuala Tungkal, 11 - 2 - 2019

KEPALA BAPENDA



YON HERI, SP, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19690801 199703 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi	4
1.5. Sistematika Penyajian	8
Bab II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)	12
2.3. Perjanjian Kinerja	13
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja BAPENDA.....	15
3.2. Realisasi Anggaran	46
Bab IV PENUTUP	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	
Lampiran 2 Rencana Kerja Tahunan (RKT)	
Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018	
Lampiran 4 Pengukuran Kinerja	
Lampiran 5 Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2018	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang telah ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan mengenai susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah di tetapkan dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga terjadi perubahan nomenklatur dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAPENDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 memuat Hasil Pengukuran Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Program/ Kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan pada Tahun 2018, sebagai Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan salah satu unsur pemerintah daerah dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Isu – isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan Program dan Kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2016-2021) sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Realisasi Pendapatan Daerah
- b. Optimalisasi Penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

- c. Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Teknologi Informasi, Sistem Perencanaan, Pendataan, Penilaian, Penetapan Penatausahaan, Pembinaan, Pengembangan, Penagihan, Sistem Pengawasan Internal, Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 / 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri PAN Nomor PER / 09 / M. PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas No. 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 52 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk Pertanggung Jawaban Instansi Pemerintah Selaku Penyelenggaraan Negara baik di tingkat Pusat maupun di daerah yang berisikan tentang Informasi Keberhasilan

maupun Kegagalan melaksanakan Misi Kepala Daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi (BPPRD)

1. Kedudukan dan Tugas Pokok

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

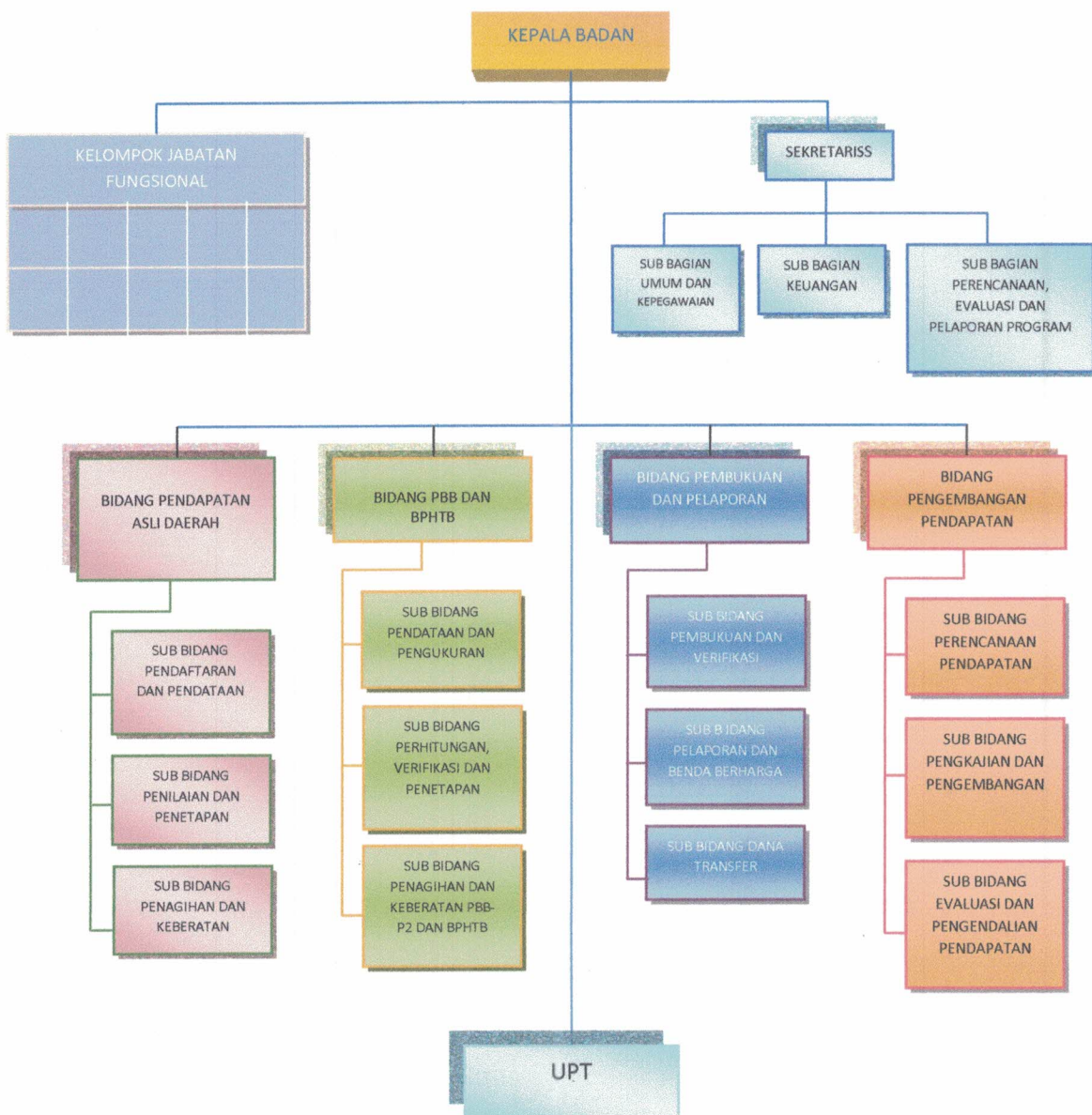
2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Asli Daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Pembukuan dan Pelaporan, Perencanaan Pendapatan dan Pelayanan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pendapatan Asli Daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Pembukuan dan Pelaporan, Perencanaan Pendapatan dan Pelayanan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pendapatan Asli Daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Pembukuan dan Pelaporan, Perencanaan Pendapatan dan Pelayanan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang Pendapatan Asli Daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Pembukuan dan Pelaporan, Perencanaan Pendapatan dan Pelayanan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi (BPPRD)



Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terdiri atas :

- a. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub bagian Umum Kepegawaian
 2. Sub bagian Keuangan
 3. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
- b. Bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :
 1. Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan
 2. Sub bidang Penilaian dan Penetapan
 3. Sub bidang Penagihan dan Keberatan
- c. Bidang PBB-P2 dan BPHTB terdiri atas :
 1. Sub bidang Pendataan dan Pengukuran
 2. Sub bidang Perhitungan, Verifikasi dan Penetapan
 3. Sub bidang Penagihan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB
- d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri atas :
 1. Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan
 2. Sub bidang Pelaporan dan Benda Berharga
 3. Sub bidang Dana Transfer
- e. Bidang Pengembangan Pendapatan terdiri atas :
 1. Sub bidang Perencanaan Pendapatan
 2. Sub bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi
 3. Sub bidang Evaluasi dan Pengendalian

4. Sumber Daya Aparatur

Personil Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Sejumlah 116 Orang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah	Pria	Wanita
1	Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon :			
	- Eselon II	1	1	-
	- Eselon III	5	5	-
	- Eselon IV	15	8	7

No	Uraian	Jumlah	Pria	Wanita
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :			
	- SMA	18	12	6
	- Sarjana Muda	2	-	2
	- Sarjana	21	11	10
	- Pasca Sarjana	4	3	1
3	Jumlah Pegawai berdasarkan Status :			
	- PNS	46	25	21
	- Kontrak	70	33	37
4	Pendidikan Perjenjangan Aparatur :			
	- Diklat PIM II	-	-	-
	- Diklat PIM III	4	4	-
	- Diklat PIM IV	9	5	4

5. Anggaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka seluruh kegiatan yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Tahun 2018 di dukung oleh APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam DPA BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung	Rp.	6.014.809.220
2. Belanja Langsung	Rp.	13.708.227.496
Jumlah	Rp.	19.723.036.716

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

 A. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

 B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran - lampiran:

- Lampiran 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Lampiran 2 Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018
- Lampiran 4 Pengukuran Kinerja
- Lampiran 5 Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2018

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan yang dipergunakan sebagai arah dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah sehingga terjadi perubahan nomenklatur dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada tahun 2016, telah disusun Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021, oleh karena tugas pokok dan fungsi organisasi tidak mengalami perubahan maka tahun 2017 Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 69 Tahun 2016 Renstra Dipenda direvisi menjadi Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2016-2021, Selanjutnya berdasarkan (perubahan) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, maka BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun (perubahan) Renstra yang mengacu pada (perubahan) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

a. Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 yaitu **TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS.**

Visi tersebut diimplementasikan kedalam 4 misi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan ekonomi yang berkualitas;
2. Meningkatkan Kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan, dengan tujuan :
 - a. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- b. Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi kerakyatan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan tujuan :
 - b. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem online dan transparan.
 - d. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
 - e. Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada e-government dan e-budgeting.

b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan yang ingin dicapai pada Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu pada Misi 3 dan Misi 4 RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021. Sasaran Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah meningkatnya pendapatan daerah melalui penerimaan pendapatan asli daerah dengan indikator serta target kinerja pada tahun 2018 sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPPRD
Berdasarkan Renstra BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018'

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja
1	Optimalisasi penerimaan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah melalui penerimaan pendapatan asli daerah	<ul style="list-style-type: none">- Tingkat kenaikan pendapatan asli daerah- Transparansi, kecepatan, kemudahan, akuntabilitas pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah- Peningkatan kompetensi pegawai dibidang pengelolaan pendapatan dan kinerja organisasi- Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah- Pelaksanaan sistem, mekanisme dan prosedur rekonsiliasi pendapatan daerah	<ul style="list-style-type: none">2%95%10%85%95%

Dari beberapa indikator diatas yang menjadi indikator kinerja utama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Tingkat kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

c. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Kinerja Utama dari Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh Instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa Instansi Pemerintah itu dibentuk yang menjadi score area/business yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi pemerintah yang bersangkutan.

Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda No. 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, bahwa target Indikator Kinerja Tabel T.VIII.C-7 Bab VIII pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 mengalami perubahan sehingga Indikator Kinerja Utama pada Renstra BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 perlu disesuaikan sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021**

No.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2021
			TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	6 %	6 %	0,21 %	2 %	5,1 %	5,3 %	5,7 %

Untuk lebih jelas IKU BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Lampiran 1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019.

2.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Sebagaimana penjabaran dari Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu pada rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang dituangkan dalam Rencana Kerja. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2018 melaksanakan 6 program dan 52 kegiatan dengan jumlah Anggaran Belanja Langsung berdasarkan APBD Perubahan TA. 2018 Sebesar Rp. 13.708.227.496 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 11 kegiatan dengan Anggaran Sebesar Rp. 3.007.081.496
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Terdiri dari 5 kegiatan dengan Anggaran Sebesar Rp. 1.282.095.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan dengan Anggaran Sebesar Rp. 104.400.000
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan dengan Anggaran Sebesar Rp. 20.000.000
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terdiri dari 7 Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 715.147.000
6. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah terdiri dari 27 kegiatan dengan Anggaran Sebesar Rp. 8.579.504.000

Dari 6 Program diatas yang menjadi program utama (prioritas) BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada RPJMD dan Renstra BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 yaitu **Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** secara lengkap Rencana Kerja BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 disajikan dalam lampiran 2 laporan kinerja Instansi pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019.

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Lembar/ Dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Tanjung Jabung Barat kepada Kepala BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna melaksanakan Program/ Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perjanjian Kinerja BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 menyajikan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, serta Target yang ingin dicapai dengan 1 (satu) Program utama serta jumlah Anggaran yang dialokasikan pada program tersebut dalam rangka mencapai sasaran strategis BPPRD. Perjanjian kinerja BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 mengalami perubahan yaitu pada Jumlah Anggaran dan Target Penerimaan PAD pada APBDP Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA. 2018 secara lengkap Perjanjian Kinerja BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Perubahan Tahun 2018 disajikan pada lampiran 3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 diambil dari hasil pengukuran Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018.

a. Pengukuran Kinerja BPPRD Tahun 2018

Sebagai dasar untuk mengukur Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berikut Rekapitulasi Laporan Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan PAD yang dikelola BPPRD Tahun 2018 sebagai berikut :

**Rekapitulasi Laporan Penerimaan Daerah dan PAD
yang dikelola BPPRD Tahun 2018**

No	Jenis Penerimaan	Penerimaan Daerah			PAD yang dikelola BPPRD			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Pajak Daerah	27.231.817.894,00	31.358.808.219,70	115,16	27.235.817.894,00	31.358.808.219,70	115,16	
	-Pajak Hotel	373.739.500,00	603.149.352,00	161,38	373.739.500,00	603.149.352,00	161,38	
	-Pajak Restoran	2.010.000.000,00	3.279.962.126,00	163,18	2.010.000.000,00	3.279.962.126,00	163,18	
	-Pajak Hiburan	20.700.000,00	8.265.000,00	39,93	20.700.000,00	8.265.000,00	39,93	
	-Pajak Reklame	355.000.000,00	345.790.857,00	97,41	355.000.000,00	345.790.857,00	97,41	
	-Pajak Penerangan Jalan	13.530.050.588,00	16.317.634.747,00	120,60	13.530.050.588,00	16.317.634.747,00	120,60	
	-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.366.367.806,00	841.012.505,00	61,55	1.366.367.806,00	841.012.505,00	61,55	
	-Pajak Air Bawah Tanah	52.000.000,00	27.200.836,00	52,31	52.000.000,00	27.200.836,00	52,31	
	-Pajak Sarang Burung Walet	270.000.000,00	162.569.000,00	60,21	270.000.000,00	162.569.000,00	60,21	
	-Pajak PBB P2	5.650.000.000,00	4.679.508.370,00	82,82	5.650.000.000,00	4.679.508.370,00	82,82	
	-Pajak BPHTB	3.600.000.000,00	5.089.395.426,70	141,37	3.600.000.000,00	5.089.395.426,70	141,37	
	-Pajak Parkir	3.960.000,00	4.320.000,00	109,09	3.960.000,00	4.320.000,00	109,09	
	2.	Retribusi Daerah	2.495.402.000,00	2.484.138.068,00	99,55	-	-	-
		-Retribusi Jasa Umum	910.002.000,00	844.609.600,00	92,81	-	-	-
-Retribusi Jasa Usaha		780.400.000,00	921.151.500,00	118,04	-	-	-	
-Retribusi Perizinan Tertentu		805.000.000,00	718.376.968,00	89,24	-	-	-	
3.	Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.981.364.971,00	10.429.377.311,40	104,49	-	-	-	
	-Bank Jambi (Deviden)	8.981.364.971,00	9.239.841.116,84	102,88	-	-	-	
	-Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanggo Rajo	1.000.000.000,00	1.189.536.194,56	118,95	-	-	-	
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	84.563.801.706,00	103.668.095.629,42	122,59	4.000.000,00	2.281.590,00	57,04	
	-Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	673.398.592,00	827.102.460,00	122,83	-	-	-	
	-Penerimaan Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.425.528.040,62	142,55	-	-	-	
	-Pendapatan Bunga Deposito	9.787.705.139,00	15.960.257.335,38	163,06	-	-	-	
	- Kerugian Barang Daerah	-	203.459.697,00	-	-	-	-	
	-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	14.101.408,00	1.180.941.264,17	8.374,63	-	-	-	
	-Pendapatan Denda Pajak	4.000.000,00	2.281.590,00	57,04	4.000.000,00	2.281.590,00	57,04	
	-Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	-	-	-	
	-Pendapatan Dari Pengembalian	3.150.000.000,00	13.615.143.112,25	432,23	-	-	-	
	-Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.950.000.000,00	8.639.600.199,00	108,67	-	-	-	
-Pendapatan BLUD Rumah Sakit	24.159.396.567,00	21.761.501.931,00	90,07	-	-	-		
- Dana BOS SD/SMP	37.825.200.000,00	40.052.280.000,00	105,89	-	-	-		
	Jumlah PAD	124.272.386.571,00	147.940.419.228,52	119,05	27.239.817.894,00	31.361.089.809,70	115,15	

No	Jenis Penerimaan	Penerimaan Daerah		PAD yang dikelola BPRD		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.	Dana Perimbangan - Bagi Hasil Pajak - Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA - Dana Alokasi Umum (DAU) - Dana Alokasi Khusus (DAK)	958.378.055.000,00	1.096.229.881.989,00	-	-	-
		109.027.924.000,00	105.796.317.817,00	-	-	-
		195.550.583.000,00	341.213.472.966,00	-	-	-
		506.589.288.000,00	506.466.327.157,00	-	-	-
		147.210.260.000,00	142.753.764.049,00	-	-	-
6.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Pendapatan Hibah - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - Bantuan Keuangan dari Provinsi	139.547.060.123,00	147.896.403.707,53	-	-	-
		41.562.146.123,00	49.911.489.707,53	-	-	-
		89.944.914.000,00	89.944.914.000,00	-	-	-
		8.040.000.000,00	8.040.000.000,00	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	1.222.197.501.694,00	1.392.066.704.925,05	27.235.817.894,00	31.361.089.809,70	115,15

Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2018 yang diukur dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja (perubahan) BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 yang telah disesuaikan dengan target Indikator Kinerja Utama yang tertera pada RPJMD dan Perubahan Renstra BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Daerah melalui penerimaan pendapatan asli daerah dengan indikator kinerja antara lain :

- 1. Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Target 2%.** Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 Rp.124.272.386.571 dan Tahun 2017 Rp.83.331.255.191 dengan target peningkatan penerimaan PAD Tahun 2018 2%, sedangkan realisasi penerimaan PAD Tahun 2017 Rp.105.183.810.752,39 dan Tahun 2018 sebesar Rp.107.888.139.228,52 Realisasi tersebut tidak termasuk Dana BOS SD/SMP karena Berdasarkan Juknis, SE Mendagri No. 910/106/SJ Dana Bos SD/SMP merupakan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat yang di Anggarkan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, yaitu pada Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, **Jadi Realisasi peningkatan Penerimaan PAD Tahun 2018 sebesar Rp.2.704.328.476,13 atau 2,57% dengan capaian kinerja 129%.**
- 2. Transparansi, Kecepatan, Kemudahan, Akuntabilitas Pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah dengan target sebesar 95%.** ini dapat diukur dari persentase realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2018, untuk pajak daerah pada tahun 2018 dari Target Rp.27.231.817.894,00 terealisasi sebesar Rp.31.358.808.219,70 (115,16%) sedangkan untuk Retribusi Daerah berdasarkan Surat Edaran Mendagri RI No. 510/3231/SJ Tanggal 19 Juli 2017 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 pada Ayat 2 Menegaskan bahwa tidak melakukan Pungutan Retribusi Izin Gangguan karena menghambat Investasi. **Jadi transparan kecepatan, kemudahan,**

akuntabilitas pelayanan kepada wajib pajak daerah terealisasi 115,16% dengan capaian kinerja 121,22%.

3. **Peningkatan kompetensi pegawai di bidang pengelolaan pendapatan dan kinerja organisasi pada tahun 2018 dengan target 10%.** Pada tahun 2018 pegawai yang mengikuti pelatihan dibidang pengelolaan pendapatan dan kinerja organisasi sebanyak 20 orang dari jumlah pegawai yang ada di BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 116 orang. **Jadi, peningkatan kompetensi pegawai dibidang pengelolaan pendapatan dan kinerja organisasi tahun 2018 terealisasi sebesar 17,24% dengan capaian kinerja 172,40%.**
4. **Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah dengan target 85%.** Indikator kinerja ini dapat diukur dari realisasi penerimaan pajak daerah yang dikelola BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2018. **Realisasi penerimaan pajak daerah yang dikelola BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Sebesar Rp. 31.358.808.219,70 atau 115,16% dengan capaian kinerja 135,48%.** Penerimaan denda pajak daerah tahun 2018 sebesar Rp. 2.281.590 dibanding dengan realisasi penerimaan pajak daerah yang dikelola BPPRD tahun 2018 hanya berkisar 0,01%. Tidak terpenuhinya target penerimaan denda izin pajak reklame hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah untuk pembangunan daerah semakin meningkat didukung kegiatan sosialisasi tentang pajak daerah yang dilaksanakan sampai tingkat desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. **Pelaksanaan sistem, mekanisme dan prosedur rekonsiliasi pendapatan daerah dengan target 95%.** Untuk mendapatkan laporan penerimaan daerah yang valid BPPRD sebagai koordinator dibidang pendapatan daerah melakukan rekonsiliasi dengan SKPD, Lembaga/Instansi terkait baik dari pusat dan daerah serta stakeholders lainnya untuk menyinkronkan data penerimaan pada masing – masing pengelola pendapatan, selain itu dilakukan upaya pengawasan melalui mekanisme

pemeriksaan secara kontinyu dan evaluasi pengendalian pendapatan daerah dengan masyarakat wajib pajak agar diperoleh hasil yang optimal. Kondisi tersebut dilaksanakan melalui upaya penyamaan persepsi dengan kegiatan:

- Rekonsiliasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB untuk penerimaan pajak PBB-P2 dan BPHTB;
- Rekonsiliasi penerimaan SKPD pengelola pendapatan daerah untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sedangkan untuk pengawasan pengendalian penerimaan pendapatan daerah dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penerimaan Pendapatan Daerah, Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah, pelayanan dan pengadministrasian benda berharga, pengelolaan data pendapatan daerah, Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah dengan capaian rata – rata 100%. Jadi untuk pelaksanaan sistem, mekanisme dan prosedur rekonsiliasi pendapatan daerah tahun 2018 terealisasi 100% dengan capaian kinerja 105,26%.

Dari beberapa Indikator Kinerja BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 adalah **Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari target 2% terealisasi sebesar 2,57%.**

b. Analisis Capaian Kinerja BPPRD Tahun 2018

Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

- A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- B. Dana Perimbangan
- C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri atas penerimaan yang bersumber dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

• Pajak Daerah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah Tahun 2018 dengan target Rp.27.231.817.894 terealisasi sebesar Rp.31.358.808.219,70 atau 115,16%, yang terdiri dari 11 jenis pajak daerah antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak BPHTB, PBB-P2 dan Pajak Parkir, Khusus untuk pajak daerah dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

• Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Daerah Tahun 2018 sebesar Rp.2.484.138.068 atau 99,55% dan Target yang ditetapkan Rp.2.495.402.000 yang terdiri : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu.

Retribusi Jasa Umum dari target Rp. 910.002.000 terealisasi Sebesar Rp. 844.609.600 atau 92,81% terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dikelola oleh dinas kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan di kelola oleh Dinas Lingkungan Hidup
- c. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum dikelola oleh Dinas Perhubungan
- d. Retribusi Pelayanan pasar dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Perindustrian dan Perdagangan
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dikelola oleh Dinas Perhubungan

- f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

Retribusi Jasa Usaha dari target Rp. 780.400.000 terealisasi Sebesar Rp. 921.151.500 atau 118,04% terdiri dari :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah dikelola oleh beberapa SKPD antara lain :
- Sewa alat berat dikelola oleh PUPR dan Dinas Perikanan
 - Sewa Mess Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sewa gedung/aula dan asrama, Ruang Pola/Balai pertemuan, Sewa Gedung Eks Serba guna, Sewa Kendaraan Dinas Bus dikelola Oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Barat.
 - Pemakaian Kekayaan Daerah (Tanah Pemda) dikelola oleh BPPKAD.
 - Sewa Water Front City (WFC), Sewa Gor Bulu Tangkis, Sewa Lapangan Sepak Bola , Sewa Lapangan Tennis, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dikelola oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.
 - Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dikelola oleh Dinas Perhubungan.

- b. Retribusi Terminal dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Perizinan Tertentu dari target Rp. 805.000.000 terealisasi Sebesar Rp. 718.376.968 atau 89,24% terdiri dari :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- b. Retribusi Izin Usaha Perikanan dikelola oleh Dinas Perikanan
- c. Retribusi Perpanjangan IMTA dikelola Oleh Dinas Tenaga Kerja

• **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2018 dengan target Rp.9.981.364.971 terealisasi sebesar Rp.10.429.377.311,40 atau 104,49% yang terdiri dari :

- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah berupa Deviden atas Bank Jambi dan BPR Tanggo Rajo yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

- **Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Pendapatan Asli Daerah dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2018 dari target Rp.84.563.801.706 terealisasi sebesar Rp.103.668.095.629,42 atau 122,59% yang terdiri dari :

- Hasil Penjualan Aset Daerah yang telah dipisahkan terdiri dari :
 - a. Penjualan Kendaraan Roda Dua, Penjualan Kendaraan Roda Empat dan Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan Pemkab Tanjab Barat di kelola oleh BPKAD
 - b. Penjualan Hasil Perkebunan, Penjualan Hasil Peternakan dan Penjualan Hasil Perikanan dikelola oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan
- Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan Bunga Deposito
Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah dari Pendapatan Bunga Deposito pada Bank : BNI, BRI, Bank Jambi yang dikelola oleh BPKAD
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kerugian barang daerah dikelola oleh BPKAD
- Pendapatan Denda Pajak
Pendapatan Denda Pajak dari Keterlambatan/Kelebihan waktu pemasangan pada Pajak Reklame dikelola oleh BPPRD
- Pendapatan dari Pengembalian terdiri dari :
Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, sisa uang kegiatan dinas/instansi, temuan pemeriksaan dan pengembalian taspem dikelola oleh BPKAD sedangkan pendapatan dan pengembalian dana UKM dikelola oleh dinas koperasi, usaha kecil, perindustrian dan perdagangan
- Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan Pendapatan BLUD rumah sakit, Perawatan maskin daerah dan Perawatan jaminan kesehatan nasional dikelola oleh dinas kesehatan.

- Dana BOS SD/SMP yang dikelola oleh Diknas untuk Tahun 2018 masuk ke penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari target Rp. 37.825.200.000, Terealisasi Sebesar Rp.40.052.280.000 penerimaan Dana BOS SD/SMP Berdasarkan Juknis,SE Mendagri No. 910/106/SJ merupakan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat yang di Anggarkan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018

NO.	JENIS PENERIMAAN	2018			ALASAN
		TARGET	REALISASI	%	
I	PAJAK DAERAH	27.231.817.894,00	31.358.808.219,70	115,16	
1.	Pajak Hotel	373.739.500,00	603.149.352,00	161,38	1. Target penerimaan untuk Pajak Hotel secara keseluruhan dapat tercapai disebabkan:
	Hotel Melati Satu	345.239.500,00	594.098.352,00	172,08	a. Adanya peningkatan penerimaan dari Hotel Syariah Mandiri
	Losmen / Rumah Penginapan / Pesangrahan / Rumah Kos	28.500.000,00	9.051.000,00	31,76	b. Pelaporan berdasarkan omzet sudah berjalan
					2. Pajak Penginapan, Losmen dan Kos-kosan tidak tercapai disebabkan adanya 2 (dua) penginapan yang tutup antara lain penginapan Berlian dan Penginapan Mutiara dan sampai akhir tahun 2018 belum difungsikan, tingkat hunian losmen, Penginapan dan Rumah Kos-kosan mengalami penurunan disebabkan kurangnya Pelanggan yang menggunakan jasa dimaksud
					Solusi yang akan dilakukan adalah:
					1. Melakukan pendataan dan sosialisasi kepada pemilik penginapan, losmen, hotel, dan rumah kos-kosan, dalam hal pemberian pelayanan yang lebih baik kepada para pelanggan
					2. Memberikan masukan kepada para pemilik penginapan, losmen, hotel dan rumah Kos-kosan agar fasilitas dan kenyamanan perlu ditingkatkan
2.	Pajak Restoran	2.010.000.000,00	3.279.962.126,00	163,18	1. Pajak Restoran mencapai target, terjadi peningkatan adanya pembayaran Catering oleh PT. Patra Saplies and Services dengan kontrak kerja sama Petro China International ltd.
	Rumah Makan	1.557.600.000,00	2.515.723.261,00	161,51	
	Kantin	452.400.000,00	764.238.865,00	168,93	2. Terjadi peningkatan pembayaran oleh Restoran / Rumah Makan dan pembayaran Pajak makan minum.
					3. Untuk kantin terjadinya peningkatan disebabkan pembayaran pajak oleh Pengusaha warung, kantin, warung nasi/ kopi dengan baik dan lancar dan makan Minum yang dilakukan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan
					Solusi yang akan dilakukan adalah:
					1. Untuk meningkatkan penyuluhan ke wajib pajak restoran
					2. Pelaksanaan uji petik terus dilakukan terhadap pengusaha restoran terhadap Besaran omset yang diperoleh dalam satu bulan
3.	Pajak Hiburan	20.700.000,00	8.265.000,00	39,93	1. Bilyard yang ada di Kab. Tanjung Barat 1 (satu) Objek
	Permainan Bilyard	2.400.000,00	1.870.000,00	77,92	2. Target pajak tempat wisata tidak berjalan sebagaimana mestinya disebabkan Pengelolannya belum maksimal oleh OPD pengelola
	Pusat Kebugaran (Fitness Center)	6.000.000,00	1.100.000,00	18,33	
	Pertandingan Olahraga	700.000,00	1.225.000,00	175,00	3. Penyelenggaraan Hiburan Insidentil tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan

NO.	JENIS PENERIMAAN	2018			ALASAN
		TARGET	REALISASI	%	
	Tempat Wisata				
	Penyelenggaraan Hiburan Insidentil	11.600.000,00	4.070.000,00	35,09	termasuk penyelenggaraan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
					4. Penyelenggaraan Fines Center yang sepi pengunjung
					Solusi yang akan dilakukan adalah:
					1. Melakukan Koordinasi dengan Disparpora dalam rangka pengelolaan tempat Wisata dan hiburan yang ada dalam Kab. Tanjung Jabung Barat
					2. Mengintensifkan pendataan dalam menggali objek pajak hiburan
4.	Pajak Reklame	355.000.000,00	345.790.857,00	97,41	
	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	270.000.000,00	303.231.038,00	112,31	1. Reklame papan nama/ Billboard/ Videotron/Megatron malampaui target yang Ditentukan disebabkan bertambahnya wajib pajak dan dilakukannya pengalihan Langsung ke lapangan Kecamatan
	Reklame Kain/Spanduk	85.000.000,00	42.559.819,00	50,07	2. Reklame kain / spanduk tidak tercapai disebabkan kurangnya pemasangan Spanduk dari sponsor – sponsor / vendor rokok
					Solusi yang akan dilakukan adalah:
					1. Akan lebih meningkatkan koordinasi dengan perusahaan / vendor untuk melaksanakan pemasangan iklan reklame yang berbentuk reklame kain/ spanduk
					2. Bentuk dan lokasi pemasangannya akan diarahkan ke tempat-tempat media Pemasangan yang telah ditentukan.
5.	Pajak Penerangan Jalan	13.530.050.588,00	16.317.634.747,00	120,60	
	Pajak Penerangan Jalan PLN	9.600.000.000,00	11.555.216.336,00	120,37	1. Pajak penerangan jalan target tercapai disebabkan terjadinya penambahan Pelanggan PLN
	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	3.930.050.588,00	4.762.418.411,00	121,18	2. Adanya kenaikan tarif PPI Non PLN
					3. Laporan pemakaian KWH oleh Perusahaan sesuai dengan apa yang disampaikan ke BPPRD
					4. Sistem data dan informasi pengelolannya semakin baik
					5. Kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk membayar pajak PPI
					Solusi yang akan dilakukan adalah:
					1. Terus meningkatkan koordinasi dengan pihak PLN dan Perusahaan PMKS
6.	Pajak Parkir	3.960.000,00	4.320.000,00	109,09	
	Pajak Parkir	3.960.000,00	4.320.000,00	109,09	1. Target pajak parkir tercapai disebabkan objek pajak MM. Fresh pembayarannya Berjalan dengan baik dan lancar
					2. Untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan pajak parkir, telah menyurati Perusahaan Indomaret yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
					Solusi yang akan dilakukan adalah:
					1. Untuk lebih menggali potensi-potensi pajak parkir dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7.	Pajak Air Bawah Tanah	52.000.000,00	27.200.836,00	52,31	
					1. Target Pajak Air Bawah Tanah tidak tercapai disebabkan:

NO.	JENIS PENERIMAAN	2018			ALASAN
		TARGET	REALISASI	%	
	Pajak Air Bawah Tanah	52.000.000,00	27.200.836,00	52,31	a. Tarif Nilai Perolehan Air (NPA) yang ditetapkan Gubernur belum disahkan b. Penggunaan atas Air Bawah Tanah berkurang disebabkan adanya pelanggan yang menggunakan air bawah tanah beralih ke PDAM bahkan ada yang sudah tutup
					Solusi yang akan dilakukan adalah: 1. Harus dilakukan perubahan tarif sesuai dengan NPA (Nilai Perolehan Air) 2. Akan dilakukan pendataan dan penertiban penggunaan air bawah tanah oleh Perusahaan
8.	Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet	270.000.000,00 270.000.000,00	162.569.000,00 162.569.000,00	60,21 60,21	1. Perkembangan populasi walet semakin menurun khususnya di wilayah Tungkal Ilir dan walet berpindah ke wilayah perkebunan 2. Penangkaran walet khususnya di wilayah Kec. Tungkal Ilir hasil yang diperoleh semakin menurun 3. Harga penjualan sarang burung walet menurun
					Solusi yang akan dilakukan adalah: 1. Akan dilakukan pendataan terhadap objek pajak sarang burung walet di wilayah Kec. Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempunyai potensi Perkembangan penangkaran sarang burung walet 2. Akan dilakukan sosialisasi terhadap pemilik penangkaran sarang burung walet Khususnya bagi pajak baru yang ada di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasir Tanah Liat Kerikil Batu Split Tanah Urug Tanah Laterik	1.366.367.806,00 180.000.000,00 50.000.000,00 340.000.000,00 330.000.000,00 306.367.806,00 160.000.000,00	841.012.505,00 45.157.050,00 2.641.250,00 88.830.000,00 238.820.085,00 402.702.680,00 62.861.440,00	61,55 25,09 5,28 26,13 72,37 131,44 39,29	1. Target pajak mineral bukan logam dan batuan tidak tercapai disebabkan Berkurangnya penjualan bahan mineral bukan logam dan batuan kepada Masyarakat dan perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor cuaca 2. Pelaksanaan kegiatan fisik yang menggunakan bahan mineral bukan logam dan Batuuan pengambilan bahan tambangnya berasal dari luar daerah sehingga Pengenaan pajaknya berada di Kabupaten lain seperti sebahagian bahan galian Mineral bukan logam dan batuan untuk penimbunan jalan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pengambilannya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
					Solusi yang akan dilakukan adalah: 1. Akan melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi, dalam pemberian Izin tambang lebih memanfaatkan bahan tambang yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perdesaan	5.650.000.000,00 3.500.000.000,00	4.679.508.370,00 3.716.419.388,00	82,82 106,18	1. Adanya data tidak valid 2. Nama tidak sesuai karena telah berpindah kepemilikan

NO.	JENIS PENERIMAAN	2018			ALASAN
		TARGET	REALISASI	%	
	Perkotaan	2.150.000.000,00	963.088.982,00	44,79	3. Objek dan wajib pajak tidak ditemukan 4. SPPT ganda
					Solusi yang akan dilakukan adalah: 1. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak 2. Melakukan koordinasi dengan camat, lurah kades dan RT setempat 3. Akan menerapkan penguasaan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang telah dihitung oleh Konsultan, terutama objek pajak yang potensial
11.	Pajak BPHTB	3.600.000.000,00	5.089.395.426,70	141,37	1. Penyelenggaraan pajak BPHTB bersifat Insidentil 2. Adanya Perusahaan yang melakukan pembayaran BPHTB 3. Kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk membayar pajak BPHTB
	Pajak BPHTB	3.600.000.000,00	5.089.395.426,70	141,37	Solusi yang akan dilakukan adalah: 1. Akan melakukan Inventarisasi terhadap perusahaan yang belum berlakukan balik Nama atas tanah yang dimiliki 2. Melakukan kerja sama dengan pihak – pihak Notaris dalam perhitungan dan Penguasaan Pajak BPHTB
	HASIL RETRIBUSI DAERAH	2.495.402.000,00	2.484.138.068,00	99,55	
	RETRIBUSI JASA UMUM	910.002.000,00	844.609.600,00	92,81	
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	200.002.000,00	185.485.000,00	92,74	OPD Dinas Kesehatan
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	110.000.000,00	65.715.600,00	59,74	OPD Dinas Lingkungan Hidup
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	90.000.000,00	47.800.000,00	53,11	OPD Dinas Perhubungan
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	110.000.000,00	114.714.000,00	104,29	OPD Dinas Perdagangan dan Koperasi
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	130.229.000,00	86,82	OPD Dinas Perhubungan
6.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	300.666.000,00	120,27	OPD Dinas Kominfo
	RETRIBUSI JASA USAHA	780.400.000,00	921.151.500,00	118,04	
I.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	700.400.000,00	836.751.500,00	119,47	
	Sewa Alat Berat Dinas PU	125.000.000,00	127.950.000,00	102,36	OPD Dinas PUPR
	Sewa Gedung/Aula atau Asrama	50.000.000,00	94.750.000,00	189,50	Sekretariat Bagian Supras
	Sewa Kendaraan Dinas Bus	35.000.000,00	49.800.000,00	142,29	Sekretariat Bagian Supras
	Sewa Water Front City (WFC)		5.000.000,00		
	Sewa GOR Bulutangkis		6.300.000,00		
	Sewa Lapangan Sepak Bola		200.000,00		
	Sewa Lapangan Tennis		400.000,00		
	Sewa Gedung Eks Serbaguna	20.000.000,00	15.500.000,00	77,50	Sekretariat Bagian Supras
	Sewa Mess Penda Tanjungbar di Jambi	35.000.000,00	7.120.000,00	20,34	Sekretariat Bagian Supras
	Sewa Alat Berat Dinas Perikanan	60.000.000,00	223.000.000,00	371,67	OPD Dinas Perikanan dan Kelautan

NO.	JENIS PENERIMAAN	2018		ALASAN
		TARGET	REALISASI %	
	Retribusi Jasa Usaha LLASDP			OPD Dinas Perhubungan
	Pemakaian Tanah Pemda (Sewa Tanah Pemda)	250.000.000,00	163.325.500,00	Sekretariat Bagian Aset
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	100.000.000,00	141.906.000,00	OPD Dinas Perhubungan
2.	Retribusi Pelelangan Ikan			
3.	Retribusi Terminal	80.000.000,00	84.400.000,00	105,50
	Peron			
	Bus Kecil			
	Truk Besar		34.300.000,00	
	Angkutan Pedesaan			
	Angkutan Barang Truk Engkel		40.000.000,00	
	Angkutan Barang Pick Up		8.100.000,00	
	Retribusi Jasa Tempat/Ruangan		2.000.000,00	
4.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	25.400.000,00	1.500.000,00	5,91
	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	805.000.000,00	718.376.968,00	89,24
1.	Retribusi IMB	300.000.000,00	214.442.868,00	71,48
2.	Retribusi Gangguan/HO			
				OPD Dinas PUPR
				OPD BPPRD (Dihapus sesuai dengan surat edaran Mendagri No. 500/3231/sj tanggal 19/7/17)
3.	Retribusi Izin Trayek			
4.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	5.000.000,00	1.200.000,00	24,00
5.	Retribusi Perpanjangan IMTA	500.000.000,00	502.734.100,00	100,55
				OPD Dinas Nakertrans
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	9.981.364.971,00	10.429.377.311,40	104,49
	YANG DIPISAHKAN			
	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan	9.981.364.971,00	10.429.377.311,40	104,49
	Milik Daerah			
1.	Bank Jambi (Deviden)	8.981.364.971,00	9.239.841.116,84	102,88
2.	Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Deviden)	1.000.000.000,00	1.189.536.194,56	118,95
				Sekretariat Bagian Keuangan / Ekonomi
				Sekretariat Bagian Keuangan / Ekonomi
	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan			
	Milik Pemerintah			
1.	BUMD Jabung Sakti			
				Sekretariat Bagian Ekonomi
	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan			
	Milik Swasta			
1.	Perusahaan Tanjung Jabung Power			
				Sekretariat Bagian Ekonomi

NO.	JENIS PENERIMAAN	2018		ALASAN
		TARGET	REALISASI %	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	84.563.801.706,00	103.668.095.629,42	122,59
	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	673.398.592,00	827.102.460,00	122,83
1.	Lelang Rumah Dinas			OPD BPKAD
2.	Penjualan Kendaraan Roda Dua	145.898.592,00	27.382.000,00	18,77
3.	Penjualan Kendaraan Roda Empat	300.000.000,00	488.556.000,00	162,85
4.	Penjualan Hasil Pertanian			
5.	Penjualan Hasil Kehutanan			
6.	Penjualan Hasil Perkebunan	100.000.000,00	121.100.000,00	121,10
7.	Penjualan Hasil Peternakan	94.500.000,00	140.422.460,00	148,60
8.	Penjualan Hasil Perikanan	18.000.000,00	20.776.000,00	115,42
9.	Sumbangan Pihak Ketiga			
10.	Penjualan Es Batu Untuk Nelayan			
11.	Penjualan Bahan Eks Bangunan Pemkab Tanjung Barat	15.000.000,00	28.866.000,00	192,44
	Penerimaan Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.425.528.040,62	142,55
	Jasa Giro Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.425.528.040,62	142,55
1.	BNI	2.073.840,00	13.597.349,00	655,66
2.	BRI	2.716.044,00	15.299.156,00	563,29
3.	BPD	995.210.116,00	1.396.631.535,62	140,34
4.	Danamon			
5.	BPR Tanggo Rajo			
	Pendapatan Bunga Deposito	9.787.705.139,00	15.960.257.335,38	163,06
	Rekening Deposito pada Bank	9.787.705.139,00	15.960.257.335,38	163,06
1.	BNI	1.100.000.000,00	4.030.479.439,00	366,41
2.	BRI	1.400.000.000,00	4.452.483.376,00	318,03
3.	BPD	7.287.705.139,00	7.477.294.520,38	102,60
4.	DANAMON			
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		203.459.697,00	
1.	Kerugian Barang Daerah		203.459.697,00	
	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan			
1.	Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan	14.101.408,00	1.180.941.264,17	8.375

NO.	JENIS PENERIMAAN	2018			ALASAN
		TARGET	REALISASI	%	
	Pendapatan Denda Pajak	4.000.000,00	2.281.590,00	57,04	Pembayaran denda pajak atas WP, pembayarannya sudah tepat waktu OPD BPPRD
1.	Denda Pajak	4.000.000,00	2.281.590,00	57,04	
	Pendapatan Denda Retribusi				
1.	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu				
	Pendapatan dari pengembalian	3.150.000.000,00	13.615.143.112,25	432,23	OPD BPKAD
1.	Pendapatan pengembalian Pajak Penghasilan 21				
2.	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan		45.898.675,00		
3.	Pendapatan dari pengembalian kelebihan perjalanan dinas				
4.	Pendapatan dari pengembalian uang muka				
5.	Pendapatan dari pengembalian sisa uang kegiatan dinas/Instansi		6.310.705.251,00		
6.	Pendapatan dari pengembalian dana UKM	650.000.000,00	100.333.300,00	15,44	
7.	Pendapatan dari hasil temuan pemeriksaan	2.500.000.000,00	6.958.306.612,25	278,33	
8.	Pendapatan dari pengembalian taspen		199.899.274,00		
9.	Pendapatan dari pengembalian pasar murah				
	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.950.000.000,00	8.639.600.199,00	108,67	OPD Dinas Kesehatan
1.	Perawatan jaminan kesehatan nasional FKTP	7.500.000.000,00	8.164.370.439,00	108,86	
2.	Dana Non Kapitasi	450.000.000,00	475.229.760,00	105,61	
	Pendapatan BLUD Rumah Sakit	24.159.396.567,00	21.761.501.931,00	90,07	OPD RSUD
1.	Pelayanan Kesehatan Umum	3.630.000.000,00	3.816.050.481,00	105,13	
2.	Perawatan Miskin Daerah (Jamkesda, Jampersal, Tanjabbar Dan Tanjabtim)	2.840.786.849,00	3.030.475.604,00	106,68	
3.	Perawatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN, KIS, Jamkesmas, Askes)	17.688.609.718,00	14.914.975.846,00	84,32	
	Dana BOS SD/SMP	37.825.200.000,00	40.052.280.000,00	105,89	OPD Diknas
1.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	27.811.200.000,00	29.377.280.000,00	105,63	
2.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	10.014.000.000,00	10.675.000.000,00	106,60	

C. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari lain-lain Pendapatan daerah yang sah pada Tahun 2018 dari Rp.139.547.060.123 Terealisasi Rp.147.896.403.707,53 atau 105,98% terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan bantuan keuangan dari provinsi.

Analisis Penyebab Terlampaunya Target Terhadap Penerimaan Pendapatan Lain-lain Yang Sah Tahun 2018

No.	Jenis Penerimaan	2018			Alasan
		Target	Realisasi	%	
1.	PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH	139.547.060.123,00	147.896.403.707,53	105,06	Terdapatnya surplus penerimaan diakibatkan dari penyaluran Dana Kurang Bayar Tw. III dan IV Tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 398/Kep.Gub/Bakeuda-2-2/2018, Nomor 618/Kep-Gub/Bakeuda-2-2/2018 dan Nomor 619/Kep-Gub/Bakeuda-2-2/2018.
1.	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	41.562.146.123,00	49.911.489.707,53		
	a. DBH Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.570.638.887,00	8.775.203.119,38		
	b. DBH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	7.980.019.920,00	9.576.023.904,00		
	c. DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	16.035.020.420,00	19.148.734.053,00		
	d. DBH Air Permukaan	177.092.217,00	212.510.661,10		
	e. Pajak Rokok	7.799.374.679,00	12.199.017.970,05		
3.	Dana Penyesuaian Otsus	-	-		Pelaksanaan Transfer Dana desa telah sesuai sebagaimana yg diamanatkan dalam Perpres 107/2017 dan PMK Nomor 50/pmk.07/2016
	a. Tunjangan Profesi Guru	-	-		
	b. Tambahan Penghasilan Guru	-	-		
4.	Dana Desa	89.944.914.000,00	89.944.914.000,00	100,00	
5.	Dana Hibah	-	-	100,00	
	1. Pendapat Hibah	-	-		
	Bantuan Keuangan dari Provinsi	8.040.000.000,00	8.040.000.000,00	100,00	Pelaksanaan Transfer Dana desa telah sesuai sebagaimana yg diamanatkan dalam pergub Nomor 37/2018 tentang pedum bantuan keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan.
	a. Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Desa dan Kelurahan	8.040.000.000,00	8.040.000.000,00		
	b. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Alat Berat dan/alat Pendukung Lainnya	-	-		

Pada Tahun 2018 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebesar Rp.1.392.066.704.925,05, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sebesar Rp.107.888.139.228,52 diluar Dana BOS SD/SMP dan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebesar Rp.31.361.089.809,70. Jadi kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap Pendapatan Daerah tahun 2018 Sebesar 7,75% sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 Sebesar 2,25%. Untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terjadi peningkatan 2,57% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Daerah tahun 2018 Sebesar 2,00%.

Sasaran Strategis BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 adalah Meningkatnya Pendapatan Daerah melalui Penerimaan PAD. Sedangkan Penerimaan Dana Transfer dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Namun, sebagaimana salah satu tugas dan fungsi pada Bidang Pembukuan dan Pelaporan BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu pada Sub Bidang Dana Transfer antara lain melakukan penyusunan rencana petunjuk dan pelaksanaan teknis, monitoring dan evaluasi penerimaan dana transfer, pengumpulan data penyaluran dana transfer yang merupakan penerimaan daerah dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Sebagai koordinator dibidang Pendapatan Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah setiap awal bulan selalu melakukan Rekonsiliasi dengan 15 SKPD (Dinas/Instansi) Pengelola Pendapatan Asli Daerah maupun Penerimaan Dana Transfer dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Untuk lebih jelas dapat dilihat di Tabel Pengukuran Kinerja pada Lampiran 4 Laporan Kinerja Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019.

c. Evaluasi Capaian Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2015-2018

Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015-2018

No	Indikator Kinerja	2015						2016						2017						2018					
		Target (Rp.)		Realisasi (Rp.)		%		Target (Rp.)		Realisasi (Rp.)		%		Target (Rp.)		Realisasi (Rp.)		%		Target (Rp.)		Realisasi (Rp.)		%	
1.	Pajak Daerah - Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Hiburan - Pajak Reklame - Pajak Penghasilan - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Pajak Air Bawah Tanah - Pajak Sarang Burung Walet - Pajak BPHTB - PBB P2 - Pajak Parkir	18.183.200.000,00 1.300.000.000,00 1.390.000.000,00 10.000.000,00 250.000.000,00 8.348.200.000,00 455.000.000,00 20.000.000,00 125.000.000,00 1.930.000.000,00 5.505.000.000,00 -	19.652.841.251,63 110.673.000,00 2.033.101.656,38 3.390.000,00 298.982.438,00 9.813.131.246,00 400.863.780,25 16.895.690,00 140.495.000,00 2.199.833.385,00 4.635.475.076,00 -	108,08 73,78 146,27 33,90 119,59 117,55 88,10 84,48 112,40 113,98 84,20	22.437.486.260,00 150.000.000,00 1.615.000.000,00 9.000.000,00 270.000.000,00 10.690.530.760,00 905.000.000,00 25.000.000,00 210.000.000,00 3.062.955.500,00 5.500.000.000,00 -	27.471.080.669,28 163.422.250,00 2.278.663.890,00 3.130.400,00 351.317.558,00 11.580.117.666,78 1.069.351.258,50 25.146.925,00 277.303.300,00 7.200.743.489,00 4.521.883.932,00 -	122,43 108,95 141,09 34,78 130,12 108,32 118,16 100,59 132,05 235,09 82,22	18.183.200.000,00 1.300.000.000,00 1.390.000.000,00 10.000.000,00 250.000.000,00 8.348.200.000,00 455.000.000,00 20.000.000,00 125.000.000,00 1.930.000.000,00 5.505.000.000,00 -	19.652.841.251,63 110.673.000,00 2.033.101.656,38 3.390.000,00 298.982.438,00 9.813.131.246,00 400.863.780,25 16.895.690,00 140.495.000,00 2.199.833.385,00 4.635.475.076,00 -	108,08 73,78 146,27 33,90 119,59 117,55 88,10 84,48 112,40 113,98 84,20	22.437.486.260,00 150.000.000,00 1.615.000.000,00 9.000.000,00 270.000.000,00 10.690.530.760,00 905.000.000,00 25.000.000,00 210.000.000,00 3.062.955.500,00 5.500.000.000,00 -	27.471.080.669,28 163.422.250,00 2.278.663.890,00 3.130.400,00 351.317.558,00 11.580.117.666,78 1.069.351.258,50 25.146.925,00 277.303.300,00 7.200.743.489,00 4.521.883.932,00 -	122,43 108,95 141,09 34,78 130,12 108,32 118,16 100,59 132,05 235,09 82,22	18.183.200.000,00 1.300.000.000,00 1.390.000.000,00 10.000.000,00 250.000.000,00 8.348.200.000,00 455.000.000,00 20.000.000,00 125.000.000,00 1.930.000.000,00 5.505.000.000,00 -	19.652.841.251,63 110.673.000,00 2.033.101.656,38 3.390.000,00 298.982.438,00 9.813.131.246,00 400.863.780,25 16.895.690,00 140.495.000,00 2.199.833.385,00 4.635.475.076,00 -	108,08 73,78 146,27 33,90 119,59 117,55 88,10 84,48 112,40 113,98 84,20	22.437.486.260,00 150.000.000,00 1.615.000.000,00 9.000.000,00 270.000.000,00 10.690.530.760,00 905.000.000,00 25.000.000,00 210.000.000,00 3.062.955.500,00 5.500.000.000,00 -	27.471.080.669,28 163.422.250,00 2.278.663.890,00 3.130.400,00 351.317.558,00 11.580.117.666,78 1.069.351.258,50 25.146.925,00 277.303.300,00 7.200.743.489,00 4.521.883.932,00 -	122,43 108,95 141,09 34,78 130,12 108,32 118,16 100,59 132,05 235,09 82,22						

No	Indikator Kinerja	TAHUN															
		2015				2016				2017				2018			
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
6.	(DAK) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Pendapatan Hibah - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - Bantuan Keuangan dari Provinsi - Dana Desa	152.514.704.263,00	146.472.442.041,00	96,04	113.403.437.253,00	105.328.499.999,36	92,88	143.620.552.527,00	150.893.816.053,34	105,06	139.547.060.000,00	147.896.403.707,53	105,98				
		-	-	-	-	-	-	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	-	-	-				
		38.551.096.263,00	40.308.834.041,00	104,56	41.923.177.253,00	33.848.239.999,36	80,74	37.730.859.527,00	45.004.123.053,34	119,28	41.562.146.123,00	49.911.489.707,53	120,09				
		100.963.608.000,00	100.963.608.000,00	100,00	71.480.260.000,00	71.480.260.000,00	100,00	90.349.693.000,00	90.349.693.000,00	100,00	-	-	-				
		13.000.000.000,00	5.200.000.000,00	67,86	-	-	156,05	11.040.000.000,00	11.040.000.000,00	100,00	8.040.000.000,00	8.040.000.000,00	100,00				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.944.914.000,00	89.944.914.000,00	100,00				
	Jumlah Penerimaan	1.024.895.044.261,00	931.326.976.528,87	90,87	1.124.146.283.672,00	1.240.686.353.744,10	110,37	1.198.560.049.688,00	1.293.454.117.828,73	108,19	1.222.197.501.571,00	1.392.066.704.925,05	113,90				

❖ **Perkembangan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015-2018 terus mengalami peningkatan, dari tabel Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015-2018 diatas dapat kita lihat bahwa Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Rp.931.326.976.528,87, Tahun 2016 Rp.1.240.686.353.744,10, Tahun 2017 Rp.1.293.454.117.828,73 dan Tahun 2018 sebesar Rp.1.392.066.704.925,05. Jumlah tersebut merupakan Akumulasi dari jumlah penerimaan pendapatan asli daerah ditambah Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2016-2018 cukup signifikan, Realisasi PAD tahun 2016 Sebesar Rp. 85.891.667.778,74 mengalami peningkatan 26,27% dari tahun sebelumnya dengan target 6%, tahun 2017 Sebesar Rp. 105.183.810.752,39, terjadi peningkatan 22,46% dari target 0,21%, Sedangkan Tahun 2018 Penerimaan PAD diluar Penerimaan Dana BOS SD/SMP terealisasi Rp.107.888.139.228,52 Terjadi Peningkatan 2,57% dari Target 2%.

2. Dana Perimbangan

Penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2015-2018 mengalami Fluktuasi, pada tahun 2015 terealisasi Rp.716.830.046.715, tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015 yaitu terealisasi sebesar Rp. 1.049.466.185.966, Tahun 2017 terealisasi Rp.1.037.376.490.573 dan Tahun 2018 Terealisasi Sebesar Rp.1.096.229.881.989, Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari tahun 2015-2017 mengalami fluktuasi, pada tahun 2015 terealisasi sebesar Rp.146.472.442.041, tahun 2016 terealisasi sebesar Rp.105.328.499.999,36 sedangkan pada Tahun 2017 terealisasi Rp.150.893.816.053,34 dan Tahun 2018 Terealisasi Rp.147.896.403.707,53.

4. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Tahun	Realisasi			Jumlah	Kinerja (%)
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah (HO)	Lain-lain PAD yang sah		
2015	19.652.841.251,63	349.764.669,00	34.504.995,00	20.037.110.915,63	-7,05
2016	27.471.080.669,28	441.042.300,00	227.638.429,00	28.139.761.398,28	40,44
2017	27.267.183.231,75	217.810.453,00	21.487.592,00	27.506.481.276,75	-2,25
2018	31.358.808.219,70	-	2.281.590,00	31.361.089.809,70	14,01

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2016 – 2018 juga mengalami fluktuasi untuk tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 40,44%, ini disebabkan penerimaan dari pajak BPHTB mengalami peningkatan dari target Rp.3.062.955.500 terealisasi sebesar Rp.7.200.743.489 atau 235,09%, tahun 2017 dari target Rp.25.905.710.806 terealisasi sebesar Rp.27.506.481.276,75 atau 106,18%, dibanding Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 2,25%. Tahun 2018 kembali mengalami kenaikan dari Target Rp.27.235.817.894 Terealisasi Rp.31.361.089.809 atau 115,16% mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 14,01%.

5. Perkembangan Kontribusi PAD dan PAD yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2015-2018

Tahun	Realisasi Penerimaan Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah	Realisasi PAD yang dikelola Dipenda	Kontribusi PAD yang dikelola BPPRD terhadap Penerimaan Daerah
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
2015	931.328.976.528,87	68.024.487.772,87	7,31	20.033.110.915,63	2,15
2016	1.240.686.353.744,10	85.891.667.788,74	6,93	28.139.761.398,28	2,27
2017	1.293.454.117.378,73	105.183.810.752,39	8,14	27.506.481.276,75	2,13
2018	1.392.066.704.925,05	147.940.419.228,52	10,63	31.361.089.809,70	2,25

Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2015-2018 berkisar antara 6-10%, sedangkan Perkembangan kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2015-2018 hanya berkisar diatas 2%, untuk tahun 2018 berdasarkan Realisasi Penerimaan Daerah untuk kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah Sebesar 10,63%, sedangkan untuk kontribusi PAD yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Penerimaan Daerah Sebesar 2,25%.

Capaian Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2016 s/d 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada			Realisasi Kinerja Sasaran Pada			Capaian Kinerja Sasaran Pada		
			Tahun I 2016	Tahun II 2017	Tahun III 2018	Tahun I 2016	Tahun II 2017	Tahun III 2018	Tahun I 2016	Tahun II 2017	Tahun III 2018
I.	Meningkatnya pendapatan daerah melalui penerimaan pendapatan asli daerah	Tingkat kenaikan penerimaan pendapatan asli daerah Transparansi, kecepatan, kemudahan, akuntabilitas pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah Peningkatan kompetensi pegawai dibidang pengelolaan pendapatan dan kinerja organisasi Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah Pelaksanaan sistem, mekanisme dan prosedur rekonsiliasi pendapatan daerah	6%	0,21%	2%	26,27%	22,46%	2,57%	437,84%	10,6955%	128,50%
			85%	90%	95%	161,45%	89,62%	115,16%	189,95%	99,58%	121,22%
			10%	10%	10%	10%	12,63%	17,24%	100%	126,30%	174,40%
			75%	80%	85%	161,45%	89,62%	115,16%	215,27%	112,03%	135,48%
			85%	90%	95%	91,11%	100%	100%	107,19%	111,12%	105,26%

d. Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja BPPRD Kab. Tanjung Jabung Barat

Dalam menjalankan fungsinya untuk menunjang pencapaian target pada pernyataan perjanjian kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 melaksanakan 6 program dan 52 Kegiatan sebagaimana tabel berikut :

**Jumlah dan Realisasi Penggunaan Anggaran
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		
		Jumlah	Proporsi (%)	Keuangan		Fisik (%)
				Jumlah	%	
PROGRAM PENDUKUNG						
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.007.081.496	21,94	2.907.652.885	96,69	100,00
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.930.000		6.012.900	46,50	100,00
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	399.100.000		375.463.854	94,08	100,00
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	403.420.000		401.920.000	99,63	100,00
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	46.938.000		39.828.800	84,85	100,00
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	247.567.356		234.942.100	94,90	100,00
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.231.500		91.499.500	92,21	100,00
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	16.739.640		12.061.750	72,06	100,00
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000		30.000.000	100,00	100,00
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	29.625.000		25.599.000	86,41	100,00
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.631.530.000		1.623.654.981	99,52	100,00
	- Penyediaan Iklan Layanan	90.000.000		66.670.000	74,08	100,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.282.095.000	9,35	1.179.590.300	92,00	100,00
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	388.000.000		381.400.000	98,30	100,00
	- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	174.000.000		173.656.800	99,80	100,00
	- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	342.920.000		294.094.000	85,76	100,00
	- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	307.850.000		261.129.500	84,82	100,00
	- Penataan Administrasi Barang Inventaris Kantor	69.325.000		69.310.000	99,98	100,00
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	104.400.000	0,76	104.000.000	100,00	100,00
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	104.400.000		104.000.000	100,00	100,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		
		Jumlah	Proporsi (%)	Keuangan		Fisik (%)
				Jumlah	%	
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal	20.000.000	0,15	20.000.000	100,00	100,00
		20.000.000		20.000.000	100,00	100,00
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Pengelolaan Pendapatan Daerah - Rekonsiliasi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB - Penyusunan Perencanaan Program Kerja Dinas/Badan - Penyusunan Perencanaan Strategi - Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah - Penatausahaan dan Pembukuan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	715.147.000	5,22	691.735.500	96,73	100,00
		94.200.000		92.800.000	98,51	100,00
		133.987.000		121.679.750	90,81	100,00
		121.910.000		120.541.000	98,88	100,00
		95.700.000		92.800.000	96,97	100,00
		90.700.000		86.700.000	95,59	100,00
		102.750.000		101.689.750	98,97	100,00
		75.900.000		75.525.000	99,51	100,00
PROGRAM UTAMA						
6.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Sosialisasi Pajak Daerah - Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Penilaian dan Penetapan Pajak/ Retribusi Daerah - Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah - Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah - Pendataan dan Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB-P2 - Evaluasi Penerimaan PBB-P2 - Verifikasi dan Validasi Data Objek dan Subjek PBB-P2 - Pengelolaan Data Sistem Informasi PBB P2 - Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah - Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah - Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Penyampaian dan Penagihan PBB-P2 - Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2	8.579.504.000	62,59	7.899.004.282	92,07	107,56
		266.125.000		249.400.000	93,72	100,00
		142.325.000		140.955.000	99,04	227,92
		100.050.000		98.425.000	98,38	147,99
		442.600.000		430.565.000	97,28	139,20
		169.259.000		161.612.000	95,48	100,00
		320.425.000		309.834.000	96,69	100,00
		700.060.000		501.557.000	71,64	79,45
		131.925.000		128.449.000	97,37	131,17
		731.125.000		720.250.000	98,51	100,00
		87.500.000		80.605.000	92,12	100,00
		192.840.000		120.550.000	62,51	100,00
		132.300.000		112.942.500	85,37	100,00
		620.800.000		590.363.732	95,10	85,82
		99.160.000		87.325.000	88,06	100,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		
		Jumlah	Proporsi (%)	Keuangan		Fisik (%)
				Jumlah	%	
	- Koordinasi Penerimaan Pendapatan Daerah	89.200.000		87.100.000	97,65	100,00
	- Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Pendapatan Daerah	91.860.000		91.860.000	100,00	100,00
	- Pelayanan dan Pengadministrasi Benda Berharga	77.550.000		74.400.000	95,94	100,00
	- Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah	148.650.000		144.700.000	97,34	100,00
	- Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah	73.800.000		72.050.000	97,63	100,00
	- Pelayanan Mobil Keliling PBB-P2	104.825.000		74.000.000	70,59	100,00
	- Ekstensifikasi dan Identifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	132.500.000		118.938.750	89,77	97,62
	- Penyusunan Statistik Pendapatan Daerah	147.250.000		121.869.300	82,76	100,00
	- Kajian dan Promosi Peningkatan Pendapatan Daerah	2.054.760.000		1.908.356.000	92,87	95,00
	- Verifikasi dan Validasi Pelayanan BPHTB	130.925.000		129.817.000	99,15	100,00
	- Pengelolaan Data Sistem Informasi 9 Pajak dan Retribusi Daerah	248.200.000		243.825.000	98,24	100,00
	- Komputerasi Pajak Daerah	548.000.000		514.945.000	93,97	100,00
	- Pengelolaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Pendapatan Daerah	595.490.000		584.310.000	98,12	100,00
	JUMLAH 2018	13.708.227.496	100,00	12.802.382.967	93,39	101,26
	JUMLAH 2017	10.411.334.667		9.651.103.273	92,70	98,76

Pada tahun 2018 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan 6 Program (5 Program Pendukung dan 1 Program Utama) dengan anggaran sebesar Rp. 13.708.227.496,- terealisasi sebesar Rp. 12.802.382.967,- (93,39%) dengan capaian fisik 101,26%. Dari tabel jumlah dan realisasi penggunaan anggaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA. 2018 diatas untuk 5 Program pendukung dengan capaian fisik masing-masing 100% sedangkan untuk Program Utama yaitu peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan capaian fisik 107,56%, ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang capai fisiknya mencapai lebih dari 100% antara lain :

1. Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan Indikator Kegiatan Terlaksananya Pendaftaran WP dan WR dari Target 6.000 WP/WR Terealisasi 13.675 WP sehingga fisiknya mencapai 227,92%.
2. Penilaian dan Penetapan Pajak/ Retribusi Daerah, dengan Indikator Kegiatan Terlaksananya Penyampaian ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari target 10.000 SPTPD/SKPD/SKRD terealisasi 14.794 SPTPD/SKPD/SKRD sehingga fisiknya mencapai 147,99%.
3. Penagih Pajak dan Retribusi Daerah, dengan indikator Kegiatan terlaksananya penagihan pajak/retribusi daerah dari target 10.000 WP/WR Terealisasi 13.920 WP/WR dengan capaian fisik 139,20%
4. Verifikasi dan Validasi Data Objek dan Subjek PBB-P2, dengan Indikator Kegiatan terlaksananya Verifikasi data objek dan subjek PBB-P2 dari target 6.000 OP PBB-P2 terealisasi 7.870 OP PBB-P2 dengan Capaian fisik 131,72%.

Sedangkan Kegiatan yang capaian realisasi keuangan maupun fisik dibawah 80% antara lain :

1. Penyediaan jasa surat menyurat dengan realisasi keuangan 46,50% disebabkan biaya paket pengiriman untuk perbaikan mesin perforasi tidak dilaksanakan karena sampai dengan bulan desember mesin perforasi masih dalam keadaan baik (tidak rusak) untuk realisasi fisik 100%.
2. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dengan realisasi keuangan sebesar 72,06% karena tidak banyak mengalami perbaikan / penggantian sehingga belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) sesuai dengan kebutuhan (efisiensi anggaran) untuk realisasi fisik 100%.
3. Penyediaan iklan layanan dengan realisasi keuangan sebesar 74,08% karena belanja disesuaikan dengan kebutuhan (efisiensi anggaran) untuk realisasi fisik telah mencapai 100%.
4. Evaluasi penerimaan PBB-P2 realisasi keuangan sebesar 71,64% dan fisik 79,45% disebabkan adanya SPPT PBB-P2 yang ganda maupun

objek/subjek PBB-P2 tidak ditemukan sehingga pada jasa penyampaian dan penagihan SPPT PBB-P2 untuk Lurah/Kades dari 110.000 OP dengan anggaran Rp. 495.000.000,- hanya terealisasi 87.877 OP dengan anggaran Rp. 307.569.500,-.

5. Pemeriksaan dan pengendalian pajak daerah realisasi keuangan sebesar 62,51% ini disebabkan pada APBDP ada penambahan dana untuk belanja jasa kerja dan transportasi, akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan uji petik pajak daerah sebesar Rp. 66.000.000,- karena keterbatasan waktu pada akhir tahun sehingga tidak dapat dilaksanakan.

Solusi yang akan dilakukan atas permasalahan yang terjadi untuk kegiatan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang pelaksanaannya tidak akan dianggarkan pada APBDP.

Program prioritas (Utama) yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai RPJMD 2016 – 2021 yakni Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pencapaian target dan realisasi Tahun 2016-2018 sebagai berikut :

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Tahun 2016				Tahun 2017				Tahun 2018			
			Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	6%	6% (83.148.347,972)	4.293.000.000	26,27% (85.891.667.798,74)	3.838.643.698	0,21% (83.331.255.191)	8.117.848.000	22,46% (105.183.811.202,39)	7.508.399.874	2% (85.000.000.000)	11.945.489.550	2,57% (107.888.139.228,52)	7.899.004.282

Sebagaimana tabel diatas dapat kami jabarkan bahwa Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian kinerja pada tahun 2016 dari

target 6% terealisasi sebesar 26,27% (jumlah penerimaan PAD sebesar Rp. 85.891.667.778,74) dengan anggaran biaya sebesar Rp. 3.838.643.698,-, tahun 2017 dari target 0,21% terealisasi 22,46% (jumlah penerimaan PAD sebesar Rp. 105.183.811.202,39) dengan anggaran biaya sebesar Rp. 7.508.399.874,- dan tahun 2018 dari target 2% terealisasi sebesar Rp. 2,57% (jumlah penerimaan PAD sebesar Rp.107.888.139.228,52) diluar penerimaan Dana BOS SD/SMP Rp. 40.052.280.000 dengan Anggaran biaya sebesar Rp. 7.899.004.282,-.

3.2. Realisasi Anggaran

Jumlah Belanja yang dianggarkan pada DPA Perubahan BPPRD Tahun 2018 Sebesar Rp. 19.723.036.716 terealisasi Sebesar Rp. 17.459.802.775 atau 88,52% yang terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Langsung	6.014.809.220	4.657.419.808	77,43
2.	Belanja Langsung	13.708.227.496	12.802.382.967	93,39
Jumlah		19.723.036.716	17.459.802.775	88,52

Belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai dengan Anggaran Rp.6.014.809.220 terealisasi Rp.4.657.419.808 atau 77,43%.

Sedangkan Belanja Langsung dari Anggaran Rp.13.708.227.496 dialokasikan untuk Program Pendukung Rutin Sebesar Rp. 5.128.723.496 dan Program Utama Sebesar Rp. 8.579.504.000 terealisasi Rp.12.802.382.967 atau 93,39%.

e. Analisis atas Efisien Penggunaan Sumber Daya

Dalam Pencapaian kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung oleh Sumber Daya antara lain Sumber Daya Aparatur, Sarana Prasarana dan Pendanaan.

➤ Sumber Daya Aparatur

Personil BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2018 sejumlah 116 orang yang terdiri dari 46 orang PNS dan 70 orang tenaga kerja kontrak (TKK) yang didistribusikan ke 5 bidang sesuai dengan struktur organisasi dan tupoksi BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

No	Bidang	PNS	TKK/TKS	Jumlah
1.	Sekretariat	16 Orang	25 Orang	41 Orang
2.	Pendapatan Asli Daerah	8 Orang	13 Orang	21 Orang
3.	PBB dan BPHTB	11 Orang	17 Orang	28 Orang
4.	Pembukuan dan Pelaporan	5 Orang	6 Orang	11 Orang
5.	Pengembangan Pendapatan	6 Orang	9 Orang	15 Orang
	Jumlah	46 Orang	70 Orang	116 Orang

➤ Sarana Prasarana

Pada saat ini Kantor BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlokasi di Jl. Beringin Kuala Tungkal. Berdasarkan Rekapitulasi Barang ke Neraca per 31 Desember 2018 Sarana dan Prasarana yang dimiliki saat ini oleh BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga	Ket
1.	Tanah		-	
2.	Peralatan dan Mesin		9.528.220.798,00	
	a. Alat-alat besar		-	
	b. Alat-alat angkutan		2.128.271.500,00	
	c. Alat-alat bengkel dan alat ukur		376.915.000,00	
	d. Alat Pertanian		-	
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga		6.662.530.298,00	
	f. Alat studio dan komunikasi		360.504.000,00	
	g. Alat-alat Kedokteran		-	
	h. Alat Laboratorium		-	
	i. Alat-alat Perenjataan/Keamanan		-	
3.	Gedung dan bangunan		15.712.204.400,00	
	a. Bangunan Gedung		15.712.204.400,00	
	b. Monumen		-	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan		64.760.000,00	
	a. Jalan dan Jembatan		-	
	b. Bangunan Air/Irigasi		64.760.000,00	
	c. Instalasi		-	
	d. Jaringan		-	
5.	Aset tetap lain		-	
	a. Buku dan Perpustakaan		-	
	b. Barang Bercorak Kebudayaan		-	
	c. Hewan dan Ternak serta Tanaman		-	
	d. Aset Renovasi		-	
6.	Konstruksi dalam pengerjaan		-	
7.	ASET LAINNYA		1.431.716.720,00	
	Aset lainnya		456.916.720,00	
	a. Aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya		-	
	b. Aset yang dimanfaatkan pihak lain		-	
	c. Aset tidak berwujud		974.800.000,00	
	Jumlah		25.305.185.198,00	

➤ **Pendanaan**

Jumlah belanja yang dianggarkan pada DPA Perubahan BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 sebesar Rp. 19.723.036.716 terealisasi Rp. 17.459.802.775 atau 88,52% yang terdiri dari :

1. Belanja tidak langsung dari anggaran Rp. 6.014.809.220 terealisasi Rp. 4.657.419.808 atau 77,43% dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.357.389.412 atau 22,57%.
2. Belanja langsung dari anggaran Rp. 13.708.227.496 terealisasi Rp. 12.802.382.967 atau 93,39% dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 905.844.529 atau 6,61%.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, capaian kinerja BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 dapat diukur dari Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 dibandingkan dengan Realisasi Penerimaan PAD tahun lalu (2017), bahwa tingkat kenaikan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 sebesar 2,57% dari target 2% dengan capaian kinerja 129%, sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2018 dari target Rp.27.235.817.894 terealisasi sebesar Rp.31.361.089.809,70 atau 115,15%.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009;
- 2) Upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, tidak dilakukan dengan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan PAD untuk kedepannya melalui Optimalisasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi pungutan Pajak dan

Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Syah, yaitu dengan cara :

- Melakukan Pendataan Subjek dan Objek Pajak Daerah
- Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi terkait
- Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Daerah
- Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melalui Kegiatan Sosialisasi

3) Terus berupaya menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah;

b. Dana Perimbangan

Penetapan pagu dana perimbangan ditetapkan berdasarkan alokasi definitif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dengan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar ada peningkatan setiap tahunnya, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBHPB).

Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan Dana Transfer (Dana Perimbangan) yang diterima oleh Daerah maka langkah kedepannya Badan Pengelola Pajak dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan antara lain :

- Mengintensifkan/ Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat khususnya dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Tekhnis (Kementerian ESDM, Kehutanan dan Perikanan) dan Pemerintah Provinsi terkait dengan Perhitungan Bagi Hasil Pajak Maupun Bukan Pajak termasuk yang diperoleh melalui Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam maupun Penerimaan Lainnya.
- Meningkatkan Pengawasan terhadap para Stake Holder/ Investor selaku Penyumbang Pendapatan yang berada di Wilayah Daerah Penghasil
- Memanfaatkan seluruh Teknologi dan Informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah sehingga perolehan data dan informasi yang akurat
- Melakukan evaluasi terhadap Penetapan Penerimaan Dana Transfer termasuk Penetapan Produksi dari Sumber Daya Alam (SDA) Migas dan Pertambangan Umum.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Pendapatan dari Bagi hasil Pajak Provinsi sesuai dengan alokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
- 2) Berkoordinasi dengan pemerintah provinsi berkaitan dengan dana transfer bagi hasil pajak.

Akhirnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disamping berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Government. Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban penyelenggaraan negara kepada masyarakat.

Kuala Tungkal, 11 - 2 - 2019

KEPALA BAPENDA,



YON HERI, SP, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19690801 199703 1 007

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT
SKPD : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TUGAS DAN FUNGSI :

- Penyusunan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Asli Daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Pembukuan dan Pelaporan, Perencanaan Pendapatan dan Pelayanan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pendapatan Asli Daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Pembukuan dan Pelaporan, Perencanaan Pendapatan dan Pelayanan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pendapatan Asli Daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Pembukuan dan Pelaporan, Perencanaan Pendapatan dan Pelayanan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Fungsi-fungsi Menunjang Urusan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Asli Daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Pembukuan dan Pelaporan, Perencanaan Pendapatan dan Pelayanan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah Melalui Penerimaan Asli Daerah	Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	KABAN BPPRD	<ul style="list-style-type: none">- RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (perubahan) Tahun 2016-2021- Renstra BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (perubahan) Tahun 2016-2021- Perda Nomor 6 Tahun 2016- Perbup Nomor 69 Tahun 2016	Perubahan IKU disesuaikan dengan Perubahan Renstra BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021

Kuala Tungkal, 18-12-2017
KEPALA BPPRD

YON HERI, SP. ME
Pembina Utama Muda

NIP. 19690801 199703 1 007

RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome)	Rencana Tahun 2018	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	3	5	6
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik		3.007.081.496
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12.930.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	399.100.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	403.420.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	46.938.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	247.567.356
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	462 Blok, 5 Exp, 2.500 bh	99.231.500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100%	16.739.640
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/ Majalah	12 Bulan	30.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan Minum Rapat, Jamuan, Petugas Piket Pelayanan	12 Bulan	29.625.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	1.631.530.000
Penyediaan Iklan Layanan	Terlaksananya Iklan Layanan	100%	90.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.282.095.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya Sarana Prasarana Aparatur	1 Unit Laptop, 1 Unit Printer dan 1 Unit AC	388.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	174.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43 Unit	342.920.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100%	307.850.000
Penataan Administrasi Barang Inventaris Kantor	Tersedianya Data Administrasi Barang Inventaris Kantor	12 Bulan	69.325.000
Peningkatan Disiplin Aparatur			104.400.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pembuatan Pakaian Dinas dan Seragam	237 Stel	104.400.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			20.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	100%	20.000.000
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			715.147.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Terlaksananya Penyusunan Laporan Kegiatan Kinerja - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	12 Bulan 4 Triwulan	94.200.000
Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Rapat Rekonsiliasi Penerimaan Daerah dengan SKPD	4 Kali	133.987.000
Rekonsiliasi Penerimaan PBB P2 dan BPHTB	Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan PBB P2 dan BPHTB	2 Kali	121.910.000
Penyusunan Perencanaan Program Kerja Dinas/Badan	- Terlaksananya Penyusunan Renja SKPD - Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD	1 Dok Renja, 2 Dok RKA	95.700.000
Penyusunan Perencanaan Strategi	Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD	1 Dok Renstra	90.700.000
Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah	Tersedianya Data Penerimaan Pendapatan Daerah yang Akurat dan Akuntabel	12 Buku Laporan	102.750.000
Penatausahaan dan Pembukuan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Administrasi yang Teratur dan Tertib penerimaan pajak dan retribusi daerah	12 Bulan	75.900.000
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			8.579.504.000
Sosialisasi Pajak Daerah	Terlaksananya sosialisasi pajak daerah	700WP	266.125.000
Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pendapatan WP dan WR	6.000 WP / WR	142.325.000
Penilaian dan Penetapan Pajak/Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	10.000 SPTPD/ SKPD / SKRD	100.050.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome)	Rencana Tahun 2018	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	3	5	6
Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak/Retribusi Daerah	10.000 WP/WR	442.600.000
Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah	Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah	4 Kali	169.259.000
Pendataan dan Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB-P2	Terlaksananya Pendapatan Wajib Pajak PBB P2	6,000 OP	320.425.000
Evaluasi Penerimaan PBB-P2	Terlaksananya penerimaan PBB-P2	5.500.000.000	700.060.000
Verifikasi dan Validasi Data Objek dan Subjek PBB-P2	Terlaksananya Verifikasi Data Objek dan Subjek PBB P2	6,000 OP PBB-P2	131.925.000
Pengelolaan Data Sistem Informasi PBB P2	Terlaksananya Pengolahan Data Sistem Informasi PBB P2	12 Bulan	731.125.000
Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah	3 Produk Hukum (perda dan perbup)	87.500.000
Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	100 WP	192.840.000
Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	2 Kali Rakor	132.300.000
Penyampaian dan Penagihan PBB-P2	Penyampaian SPPT dan Penagihan PBB P2 dan BPHTB	110,200 SPPT 700 BPHTB	620.800.000
Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB - P2	Terlaksananya Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB P2	1 Kali	99.160.000
Koordinasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pendapatan Daerah	12 Bulan	89.200.000
Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Pendapatan Daerah	Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Pendapatan Daerah	100%	91.860.000
Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga	Terlaksananya Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga	12 Bulan	77.550.000
Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah	Tersusunnya Target Penerimaan Pendapatan Daerah	2 Kali	148.650.000
Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah	12 Bulan	73.800.000
Pelayanan Mobil Keliling PBB-P2	Terlaksananya Pelayanan Mobil Keliling PBB P2	8 Kec 64 Kali	104.825.000
Ekstensifikasi dan Identifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Kegiatan Ekstensifikasi dan Identifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	4.500 OP	132.500.000
Penyusunan Statistik Pendapatan Daerah	Penyusunan Statistik Pendapatan Daerah	100%	147.250.000
Kajian dan Promosi Peningkatan Pendapatan Daerah	Memotivasi Wajib Taat Pajak	250 WP	2.054.760.000
Verifikasi dan Validasi Pelayanan BPHTB	Terlaksananya Verifikasi Data Objek BPHTB	700 WP	130.925.000
Pengelolaan Data Sistem Informasi 9 Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Data Berbasis Sistem Informasi Pengelolaan Pajak yang Efektif, Transparan dan Akurat	12 Bulan	248.200.000
Komputerisasi Pajak Daerah	Komputerisasi Pajak Daerah	100%	548.000.000
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Pendapatan Daerah	100%	595.490.000
			13.708.227.496

Kuala Tungkal,

2018

KEPALA BPPRD,

YON HERI, SP, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19690801 199703 1 007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERUBAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YON HERI, SP, ME
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir .H. SAFRIAL, MS
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS

Kuala Tungkal, 28-11-2018

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN,

YON HERI, SP, ME

Pembina Utama Muda

NIP: 19690801 199703 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERUBAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah Melalui Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	2%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 8.579.504.000	Dana APBD

Kuala Tungkal, 28 - 11 - 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 2



Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS

KEPALA BPPRD



YON HERI, SP, ME

No.	Kategori	Sub-kategori	Program dan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target/ Sasaran	Mekanisme Pelaksanaan	Jumlah Realisasi											
							Tahun Pelaksanaan											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
			13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
			16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
			17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
			18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
			19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
			22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
			23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
			24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
			26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
			27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
			28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
			29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
			33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
			34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
			35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
			36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
			37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
			38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
			39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Masrizki Pratiwi, S.T., M.M.
Kepala SPPRD

YON HERI SP, M.E
Pembina Utama Muda
NIP. 19608003 199703 1 007

